

## e-Partisipasi Politik

Joyo Nur Suryanto Gono

[jnsgono@yahoo.com](mailto:jnsgono@yahoo.com)

(Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro)

---

### **Abstract**

*The presence of technology-based digital media into our society exciting interactive communication activities. The new media is increasingly growing due to the application of technology mobile phones that connect to the Internet service (smartphone) devices such as the Blackberry products, other Internet technology applications for interactive services such as Line, WhatsApp. The concept eParticipant or digital democracy refers to the presence of this technology, so that the process of political communication will undergo rapid transformation. eParticipant is a term to describe computer-based information and information technology is used to empower the awareness and knowledge (cognition), communicate, and process collaboration (cooperation) people so that they jointly build a social system that is participatory.*

**Keywords:** e-Political Participant, Digital Democratic, Empowerment.

---

### **Abstrak**

*Hadirnya mediaberbasis teknologi digital ke tengah masyarakat kita menggairahkan kegiatan komunikasi interaktif. Media baru kini semakin berkembang karena aplikasi teknologi telpon genggam yang terkoneksi dengan layanan Internet (smartphone) seperti produk perangkat Blackberry, aplikasi teknologi Internet lain untuk layanan interaktif seperti Line, WhatsApp. Konsep ePartisipasi atau demokrasi digital mengacu pada kehadiran teknologi ini, sehingga proses komunikasi politik akan mengalami transformasi secara pesat. ePartisipasi merupakan istilah untuk mendeskripsikan informasi berbasis komputer dan teknologi informasi yang digunakan untuk memberdayakan kesadaran dan pengetahuan (kognisi), berkomunikasi, dan proses kerjasama (kooperasi) manusia sehingga mereka secara bersama-sama membangun sistem sosial yang partisipatori.*

**Kata Kunci:** ePartisipasi Politik, Demokrasi Digital, Pemberdayaan.

---

## Pendahuluan

Jika radio adalah medium komunikasi zaman kemerdekaan Indonesia, maka Internet mungkin berpacu mencapai tempat teratas dalam proses jatuhnya Soeharto. Tak dapat disangkal bahwa dalam dua tahun terakhir pemerintahan Soeharto, Internet digunakan secara ekstensif oleh kaum oposisi kelas menengah perkotaan untuk menghindari sensor me-

dia siaran yang diterapkan rezim Orde Baru. Para mahasiswa menggunakan Internet untuk merencanakan gerakan mereka dan mengukur dukungan internasional dalam membangun demonstrasi nasional yang besar, yang akhirnya menumbangkan rezim Soeharto. Pada hari-hari terakhir, beberapa mahasiswa yang menduduki gedung parlemen memakai

*laptop* untuk "mengirimkan berita secara *online*, sementara tentara dengan ketat menjaga di sekeliling mereka (Sen dan Hill, 2001). Proses politik kala itu merupakan proses menuju reformasi demokrasi yang partisipatif, menggunakan teknologi komunikasi Internet yang memiliki kapasitas untuk mendemokraskan komunikasi.

Setelah hampir 20 tahun berlalu, seiring dengan perkembangan internet yang sangat cepat, teknologiperangkat aplikasi pendukung juga berkembang, maka internet makin berperan menyumbang penggalangan dukungan bagi masyarakat untuk suatu kasus politik. Pada kampanye Pilpres 2014, media sosial banyak digunakan oleh perancang kampanye maupun sukarelawan pendukung capres untuk menyampaikan isu-isu politiknya. Keterlibatan secara politik, pengguna media sosial, baik melalui aplikasi pada laptop, tablet, PC, *smartphone* cukup baik.

Penelitian tentang media sosial dan partisipasi politik pada pemilih pemula Pilpres 2014 di Semarang menyimpulkan bahwa, sebagian besar responden melek media sosial. Mereka menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dan sarana mendapatkan informasi. Tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan presiden 2014 di Semarang sangat tinggi, hal ini

ditandai sebagian besar pemilih pemula ikut berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih. Ada pengaruh positif penggunaan media sosial dikalangan pemilih pemula pada Pemilihan-an Presiden 2014 di Semarang dengan partisipasi politik mereka dalam menentukan siapa yang akan dipilih menjadi presiden dan wakitl presiden periode 2014-2019. Partisipasi politik yang paling terpengaruh dengan adanya jejaring sosial media-media sosial adalah penggunaan hak pilih pada saat Pemilihan Presiden 2014 dilangsungkan (Gono, 2014).

Pemberitaan tentang persoalan-persoalan politik awal tahun 2015 tentang Polri-KPK, menyentak jagad media kita. Berawal dari pengajuan BG, sebagai calon tunggal Kapolri, ternyata tidak berjalan lancar karena tidak perlu waktu lama, KPK mengumumkan BG sebagai tersangka kasus "Rekening Gendut". Eskalasi situasimenghangat di media yang terus meningkat sudah barang tentu menimbulkan ketegangan sosial. Semua media cetak nasional menempatkan berita tersebut sebagai berita utama, demikian juga TV menjadikan peristiwa itu sebagai topik yang harus di kupas tuntas, sehingga selain melakukan wawancara dengan sumber berita, TV juga melakukan wawancara secara intens dengan nara

sumber yang dianggap ahli. Berbagai komentar dari para ahli justru nampaknya memanasakan situasi jagad media semakin meninggi. Setelah pada akhirnya eskalasi mengalami penurunan cukup tajam karena pernyataan sikap Presiden Jokowi atas kasus tersebut, dengan membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri, dan mencalonkan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Juga menonaktifkan 2 orang pimpinan KPK, AS dan BW dari jabatannya karena disangka melakukan pelanggaran hukum.

Sementara itu Presiden juga melantik 3 orang pimpinan KPK baru yang ber-sifat sementara waktu. Peristiwa ini bahkan sempat menjadi *trending topic* hampir sebulan penuh di media sosial, dan menenggalamkan topik berita tentang kecelakaan pesawat "AirAsia" di Selat Karimata sebelumnya. Kehadiran banyak kalangan masyarakat di gedung KPK untuk menunjukkan dukungan publik kepada program pemberantasan korupsi nasional, dipicu juga oleh media sosial yang hampir tiap orang muda perkotaan memilikinya.

Potensi keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktifitas sehari-hari melalui penggunaan media sosial menunjukkan eskalasi peningkatan. Hal ini karena media sosial merupakan salah satu jenis media baru, yang menurut

Nicholas Gane dan David Beer (2008) karakteristik media baru adalah *network, interactivity, in-formation, interface, archive, dan simulati-on*(yang dikutip oleh Nasrullah, 2014, hal. 14). Pengertian interaktif di era media baru ini, menunjukkan bahwa khalayak yang menggunakan media sosial misalnya, bisa melakukan komunikasi "talk back" secara langsung dengan intensitas penggunaan bahasa tulis (*chatting*) lebih tinggi, sekalipun tersedia juga layanan penggunaan *webcam* untuk bertatap muka melalui media baru itu. Rulli Nasrullah menuliskan bahwa, kehadiran situs jejaring sosial atau sering disebut dengan media sosial (*social media*) seperti *Facebook, Twitter, dan Skype*, merupakan media yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil, aktifitas, atau bahkan pendapat pengguna juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring di ruang siber.

Misalnya fasilitas *Facebook*, yakni *wall* (dinding) pengguna bisa mengungkapkan apa yang sedang disaksikan/dialami, keadaan di sekitar dirinya, hingga bagaimana tanggapannya terhadap situasi, misalnya, politik pada saat ini. *Facebook* juga menyediakan fasilitas grup; fasilitas yang mengumpulkan pengguna *facebook* yang

tertarik atau memiliki kesamaan terhadap suatu konten (Nasrullah, 2014).

Kegiatan komunikasi interaktif media sosial kini semakin berkembang karena aplikasi teknologi telepon genggam yang terkoneksi dengan layanan internet (*smartphone*) seperti produk perangkat *Blackberry*. Selain itu aplikasi teknologi internet lain untuk layanan interaktif seperti *Line*, *WhatsApp*. Menurut catatan *Rulli Nasrullah (2014)* cara kerja dari aplikasi tersebut bisa digolongkan ke dalam kategori *peer-to-peer* atau *chatroom* yang dapat diakses melalui perangkat komputer tablet, dengan desain aplikasi ini lebih banyak dimanfaatkan pada perangkat telepon genggam. Fasilitas lain yaitu pertukaran data dan informasi, melakukan penyebaran pesan, hingga pada interaksi yang melibatkan audio-video seperti *live streaming* (Nasrullah, 2014, hal. 32).

### **e-Partisipasi dan Demokrasi Digital**

e-Partisipasi merupakan istilah yang mendeskripsikan informasi berbasis komputer dan teknologi informasi yang digunakan untuk memberdayakan kesadaran dan pengetahuan (kognisi), berkomunikasi, dan proses kerjasama (kooperasi) manusia sehingga mereka secara bersama-sama membangun sistem sosial yang partisipatori. Konsep demokrasi digital arus

bawah, sama halnya dengan konsep ePartisipasi, menekankan komunikasi digital warga dengan warga dan proses komunikasi dalam kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan protes masyarakat sipil non pemerintah. Mereka memiliki visi dan melalui proses komunikasi suatu masyarakat partisipatori alternatif, maka akan memunculkan kemampuan mengatur dan mengelola diri (Fuchs, 2008). *Ann Macintosh* mengemukakan bahwa *e-voting* dan e-Partisipasi merupakan dua aspek demokrasi elektronik. Ada tiga dimensi partisipasi yaitu akses informasi elektronik yang memadai, keterlibatan warga negara secara *online* dalam konsultasi kebijakan, pemberdayaan secara *online*.

Secara lebih luas, *Hacker dan Van Dijk* mendefinisikan tentang demokrasi digital yang merupakan kerangka bagi aktifitas ePolitik, bahwa politik *online* merupakan aktifitas yang memungkinkan dari orang-orang yang secara fisik terpisah satu sama lain dan mengesampingkan berbagai karakteristik praktek politik *online* kontemporer, contohnya adalah gerakan sosial. Demokrasi digital diartikan sebagai sekumpulan upaya praktek demokrasi, yang tidak terbatas waktu, ruang dan kondisi fisik lain, menggunakan ICT atau CMC, hal ini tidak berarti mengubah praktek politik analog tradisional (Hacker dan Van Dijk, dalam Fuchs, 2008). Sekalipun

demikian menurut *Catinat dan Vedel* (2008), demokrasi digital dapat mencakup semua penggunaan ICT yang akan mempengaruhi dan mengubah fungsi suatu demokrasi, yang secara lebih spesifik mempengaruhi dan mengubah cara mendasar menyatakan pendapat, berdebat, pemilihan umum, membuat keputusan (Fuchs, 2008). *Martin Hagen* mengidentifikasi 3 konsep berbeda demokrasi digital yaitu: 1) gagasan tentang teledemokrasi yang menekankan demokrasi langsung dalam bentuk elektronik voting, 2) pemikiran cyberdemokrasi yang berfokus pada demokrasi langsung dalam bentuk komunitas virtual, diskusi online, dan aktifitas online melawan kekuasaan negara terpusat, 3) konsep demokratisasi elektronik, demokrasi representatif yang meningkat karena ada jalur umpan balik langsung antara pemilih dan wakil rakyat dan sistem informasi politik online yang menyediakan akses lebih banyak dan lebih bebas bagi informasi pemerintah yang sangat penting. Penggunaan jaringan komputer akan berfungsi penting bagi proses demokratisasi seperti proses informasi dan komunikasi, artikulasi dan agregasi kepentingan, dan pembuatan keputusan (untuk kepentingan kesejahteraan maupun pemilu) (Hagen, dalam Fuchs, 2008).

Secara tradisional, definisi demokrasi partisipasi, menurut *Christian*

*Fuchs*, merupakan proses dinamis komunikasi dalam masyarakat sipil dan pengaturan administrasi publik yang saling mengisi satu sama lain untuk menjamin reproduksi sistem politik terus menerus. Dinamika dalam masyarakat sipil itu ditandai dengan meningkatnya relevansi NGO (LSM) dan gerakan protes dalam masyarakat. Hal itu menunjukkan masyarakat lebih partisipatif karena mereka bisa mempengaruhi keputusan, ikutserta dalam proses pembuatan keputusan. Dalam demokrasi partisipasi diperlukan dukungan teknologi, sumber daya, organisasi, ke-trampilan orang-orang untuk merancang dan mengelola sistem sosial seluruh anggota masyarakatnya, kemampuan mengembangkan visi mereka untuk masa depan yang lebih baik, sehingga rancangan sistem sosial tersebut akan bermanfaat bagi peningkatan intelegensi mereka secara kolektif (Fuchs, 2008). Demokrasi partisipatif membuka peluang bagi kita secara individual dan kolektif untuk mengembangkan design kebudayaan yang memberdayakan kita agar bisa menciptakan, mengatur, dan secara tetap memelihara sistem kita (Banathy, 1996, dalam Fuchs, 2008).

Menurut *Habermas* (1968), proses komunikasi politik dalam masyarakat sipil ini terjadi karena terbentuk *public sphere* untuk wacana politik (*political dis-*

course). *Public sphere* merupakan ruang untuk memecahkan masalah menggunakan tindakan komunikatif. Hal ini memungkinkan bagi wacana yang bebas dari dominasi, yaitu, komunikasi yang lebih mengutamakan kebenaran sesuai fakta, terpercaya (kesesuaian antara apa yang dinyatakan dengan tujuannya), menyeluruh (Jurgen Habermas, dalam Fuchs, 2008). Pendekatan Habermas menunjukkan bahwa komunikasi merupakan aspek penting dari partisipasi. Dalam sistem partisipasi, tindakan komunikatif merupakan proses yang memungkinkan masyarakat sipil membentuk *public sphere* yang diskursif, artinya kritik dan argumen publik mengenai opini yang berbeda diberikan tempat untuk mendapatkan perhatian publik. *Public sphere* bukanlah sistem tunggal tetapi bersifat menyeluruh yang membangun ruang komunikasi politik dalam kehidupan sehari-hari dimana orang-orang terlibat dalam argumen dan kontroversi politik yang terbuka sehingga orang lain juga untuk ikut terlibat (Christian Fuchs, 2008). Partisipasi ini dianggap penting karena: (1) Partisipasi merupakan hak azasi manusia, (2) Sistem partisipasi dianggap lebih demokratis dan efektif, (3) Partisipasi menumbuhkan sisi perjuangan dan kebahagiaan umat manusia, (4) Partisipasi merupakan prasyarat bagi konsensus. Partisipasi menciptakan sua-

sana saling menghormati (5) Partisipasi dapat menjamin tiap orang mengambil bagian dalam sistem sosial lebih efektif dan menempatkan derajat komitmen yang lebih kuat, (6) Partisipasi bersinergi dengan tumbuhnya kerjasama memproduksi pengetahuan.

Dalam sistem ini tiap orang diberikan ruang melakukan kontrol dan memperoleh sumber daya seperti properti, teknologi, relasi sosial, pengetahuan, serta ketrampilan agar mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam sistem, membangun sikap kritis dan bertanggung jawab, sehingga memungkinkan mereka terlibat pengambilan keputusan secara kolektif. Partisipasi ini merupakan sistem yang memberdayakan, mengajak orang untuk berkontribusi dalam membuat keputusan, menggunakan kreatifitas intelektual individual maupun kolektif, jadi keterbukaan dan kedewasaan berpikir secara individual, merupakan watak sistem ini.

Berkenaan dengan partisipasi politik, secara ringkas Rodrick P. Hart (dalam Bennet dan Entman, 2001) mengemukakan bahwa, partisipasi politik merupakan keterlibatan orang dalam politik yang mencakup keikutsertaan dalam pemilu, memiliki banyak informasi mengenai pilihan-pilihan politik, menyatakan pendapat, beraktifitas untuk kampanye pemilu, sikap mempertahankan dan melanjutkan

kan sistem. Sedangkan ahli lain menunjuk pada memberi donasi keuangan bagi kegiatan politik, merelakan waktu untuk politik, bergabung dengan kelompok-kelompok sosial. Dari perspektif yang lebih luas ditemukan yaitu kesukarelaan warga negara. Banyak ahli juga menemukan keterlibatan politik adalah suatu produk dan sesuatu yang diproduksi. Tingginya efikasi politik menentukan keterlibatan, misalnya membicarakan soal-soal publik dalam interaksi sosial tiap hari. Jadi partisipasi politik para pemilih meningkat karena ke-sadaran politik, biasanya berhubungan dengan saat kampanye pemilu.

Penelitian berikut berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi berbasis internet yaitu media sosial, untuk kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang 2015, oleh pemilih pemula di Kota Semarang (Gono, 2016). Media sosial sangat akrab dikalangan remaja SLTA, yang merupakan pemilih pemula dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang 2015. Sebagian besar responden merupakan pengguna aktif jaringan komunikasi melalui media sosial, dan sebagian besar responden aktif menggunakan beberapa aplikasi media sosial lebih dari satu jenis seperti *facebook*, *line*, *whatsapp*, *instagram* dll. Mengenai hal ini, 93 % merupakan pengguna aktif media sosial untuk berkomunikasi secara *online*,

dan 74 % memanfaatkan lebih dari satu aplikasi media sosial. Dari pendalaman atas pertanyaan ini diperoleh data media sosial *facebook*, *twitter* dan *whatsapp* merupakan tiga besar media sosial yang banyak digunakan oleh pemilih pemula.

Media sosial bukan merupakan barang baru bagi para pemilih pemula. Bila saat ini asumsi usia para pemilih pemula pada kisaran 17 s/d 19 tahun atau duduk di bangku SLTA, semua remaja yang menjadi pemilih pemula sudah mengenal media sosial sejak berada di bangku SLTP. Dari jawaban responden mengenai berapa lama mereka menggunakan media sosial semuanya sudah mengenal lebih dari 1 tahun lalu bahkan sebagian besar (77%) menggunakan media sosial sudah lebih dari tiga tahun yang lalu.

Alat untuk mengakses media sosial bagi para pemilih pemula adalah *handphone* dan Komputer. Kedua perangkat ini memang sudah menjadi alat baku yang dimiliki remaja di tingkat SLTA. Dari jawaban atas pertanyaan tentang alat yang digunakan dalam berkomunikasi melalui media sosial 93% pemilih pemula dapat menggunakan keduanya. Artinya mereka selain memiliki *handphone* sebagai sarana komunikasi juga memiliki perangkat komputer laptop yang dapat juga digunakan untuk mengakses media sosial. Hanya 8% yang menggunakan salah satu

yaitu 6% bermedia sosial melalui komputer dan 2% yang hanya menggunakan *handphone*.

Aktifitas menggunakan media sosial dikalangan pemilih pemula masuk dalam kategori aktif. Dalam hal ini mereka memiliki akun di media sosial bukan hanya sekedar mengikuti perkembangan jaman, namun benar-benar digunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi. Dari pertanyaan tentang seberapa sering mereka membuka akun media sosialnya diper-oleh data 96% pemilih pemula di kota Semarang hampir setiap hari membuka akun media sosialnya, Hanya 4% yang menyatakan seminggu sekali mereka membuka akun media sosialnya. Sedangkan 64% dari pemilih pemula selalu menggunakan media sosial untuk mendapatkan berita dan informasi selain sebagai media pergaulan untuk *chatting* dan ber-komunikasi dengan sesama pengguna yang lain, sedangkan 36% sisanya hanya kadang-kadang memanfaatkan akun media sosialnya untuk mencari berita dan informasi tetapi lebih sering menggunakan hanya sebagai media *chatting* dan berkomunikasi dengan temannya.

Penggunaan media sosial untuk membahas masalah sosial politik diantara para pemilih pemula dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan "selain untuk

pergaulan, apakah saudara juga menggunakan media sosial untuk membahas masalah-masalah sosial dan politik di Indonesia?"

Para pemilih pemula di kota Semarang belum menjadikan media sosial sebagai media dalam mencari dan membahas isu-isu sosial politik. Dari responden yang menjawab pertanyaan di atas hanya 12% yang secara aktif menggunakan untuk mencari dan membahas masalah sosial politik di media sosialnya selebihnya hanya bila ada teman yang mengajak membahas atau ada teman yang mengunggah informasi sosial politik saja mereka ikut membacanya dan bahkan 11% diantara para pemilih pemula tidak pernah membaca atau membahas isu-isu sosial politik melalui media sosialnya.

Sedang dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah di Semarang, saat ditanya dari mana mereka tahu nama-nama calon kepala daerah kota Semarang, hanya 38% yang mengaku mengetahui dari informasi media sosial selebihnya 39% dari media konvensional radio, televisi dan surat kabar, dan 23% diantaranya mengetahuikarena diberi tahu oleh temannya atau orang tuanya. Sumberinformasi tentang itu bukan berasal dari media sosial dan lebih banyak dari media konvensional ini dapat

dimengerti karena sebagian besar pemilih pemula tidak secara aktif mencari informasi-informasi tentang pilkada kota Semarang melalui media sosialnya.

Peran pasif ini lebih terlihat nyata ketika responden diminta menjawab pertanyaan apakah pernah mendiskusikan pilihan kepala daerah di media sosialnya. Sebagian besar pemilih pemula menjawab tidak pernah (57%). Mereka yang mengatakan kadang-kadang 43%, dan hanya 3% yang mengatakan sering mendiskusikan di media sosial. Sebagian besar pemilih pemula adalah pengguna pasif beberapa diantaranya merupakan *follower* media sosial tim sukses pasangan calon, yaitu sebesar 10%, dan 3% sisanya sering memberikan komentar di media sosial tim sukses pasangan calon.

Iklan layanan masyarakat tentang pilkada kota Semarang tercantum di akun media sosial pemilih pemula. Dari pemilih pemula yang ada di kota Semarang 60% diantaranya pernah mendapat dan membaca informasi tentang pilkada melalui media sosial yang ia ikuti sedangkan 40% yang lain menyatakan tidak pernah mendapatkan. Sedangkan iklan kampanye dari tim sukses pasangan calon justru jarang masuk ke akun media sosial pemilih pemula. Hal ini nampak dari data yang diperoleh hanya 25% dari pemilih pemula yang menyatakan pernah menerima iklan

kampanye dari tim sukses pasangan calon sedang 75% yang lain menyatakan tidak pernah menerima iklan kampanye di media sosialnya. Antara pemilih pemula yang pernah membaca dan yang tidak pernah membaca istilah Hebat, Sibagus dan Maju melalui media sosialnya jumlahnya hampir sama yaitu, 49% responden menyatakan tidak pernah membaca sedang 51%.

Selain partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang 2015 tinggi yaitu ikut menggunakan hak pilih mereka pada saat hari pemilihan, kepedulian akan adanya suksesi kepemimpinan kepala daerah pada pemilih pemula juga cukup tinggi. Hal ini nampak dari responden yang diteliti sebagian besar mengikuti perkembangan berita pemilihan kepala daerah kota Semarang dengan berbagai cara mereka, yaitu melalui media konvensional, media *online* ataupun cara-cara yang lain. Sebagian besar pemilih pemula (66%) mengikuti perkembangan berita tentang pemilihan kepala daerah, dengan rincian 40% diantara pemilih pemula selalu mengikuti perkembangan, 26% mengikuti, meskipun hanya kadang-kadang. Sedangkan 34% lainnya menyatakan tidak pernah mengikuti. Perkembangan berita di sini adalah semua informasi yang terkait dengan pemilihan pilkada yaitu berita tentang

pasangan calon maupun berita-berita tentang pilkada yang lain. Sedangkan kepedulian untuk mengikuti informasi tentang kampanye, yang dilakukan oleh pasangan calon melalui tim suksesnya terjadi sebaliknya, sebagian besar tidak mengikuti kampanye pasangan calon.

Peran aktif pemilih pemula dalam menyebarkan berita atau mengajak orang lain untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah termasuk cukup baik. Dalam arti bahwa pemilih pemula memiliki kepedulian untuk secara bersama-sama ikut mensukseskan dengan cara mengingatkan atau mengajak orang lain untuk hadir dalam pemilihan kepala daerah. Sebanyak 44% responden menyatakan pernah mengajak orang lain untuk hadir di pilkada, 12% bahkan menyatakan selalu mengingatkan sedang yang menyatakan tidak pernah melakukan sebanyak 44%. Sedangkan untuk keterlibatan pemilih pemula sebagai aktifis yang bertugas untuk mensosialisasikan informasi-informasi Pemilu, 16% yang menyatakan pernah terlibat sebagai aktifis, sedangkan 84% lainnya menyatakan tidak pernah terlibat sebagai aktifis.

Pemilih pemuladidak mengenal dengan baik calon secara mendalam, tentu saja selain calon walikota *incumbent*, 53% responden menyatakan tidak mengenal pasangan calon, sedangkan yang menya-

takan mengenal siapa pasangan calon kepala daerah kota Semarang sebanyak 47%. Sekalipun demikian pemilih pemula sudah mempunyai rencana atau pilihan mana yang akan dicoblos saat hari pemungutan suara. Meskipun 22% diantara pemilih pemula masih ragu-ragu tentang pilihannya tetapi mereka sudah punya gambaran. Sedangkan mereka yang sudah mantap dengan apa yang hendak dipilihnya sebanyak 39% dari pemilih pemula. Sementara yang belum mempunyai bayangan siapa yang hendak dipilihnya sebanyak 39%.

Kehadiran pemilih pemula ke tempat pemungutan suara (TPS) saat pelaksanaan cukup baik. Pemilih pemula di kota Semarang yang hadir di TPS saat pelaksanaan pilkada hanya sebanyak 64%, dan36% lainnya tidak hadir. Dari pemilih pemula yang hadir di TPS (64%) sebagian besar menggunakan hak suaranya (43%) sedangkan yang 21% hadir tetapi tidak memilih salah satu.

Partisipasi pemilih pemula pada tahapan pelaksanaan Pemilu, sejak dari kampanye, pelaksanaan ataupun saksi pengawasan rata-rata rendah. Secara lengkap adalah 96% menjawab tidak pernah mengikuti, sedangkan yang menyatakan pernah mengikuti hanya 4%. Begitu pula jumlah mereka yang ikut menjadi tim sukses pasangan calon hanya

ada 8% yang menyatakan ikut sebagai simpatisan tim sukses pasangan calon sedangkan sebagian besar 92% menyatakan tidak terlibat sebagai tim sukses.

Partisipasi pada pelaksanaan pemungutan suara meskipun hanya sedikit yang menjalankan namun cukup menunjukkan adanya kepedulian para pemilih pemula. Ada 8% dari pemilih pemula yang merasa terdorong untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan suara. Meskipun bukan sebagai panitia resmi tetapi mereka membantu panitia untuk suksesnya pemilihan suara pemilihan kepala daerah di tempatnya. Sedangkan mereka yang tidak terlibat sama sekali dalam kepanitiaan sebesar 92 %.

Keterlibatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemungutan suara lebih besar bila dibandingkan dengan keterlibatan mereka sebagai panitia. Dari jawaban responden terhadap pertanyaan apakah mereka terlibat sebagai saksi salah satu pasangan calon diperoleh data mereka yang menyatakan terlibat sebesar 11%, sedangkan yang menyatakan mereka tidak terlibat sebesar 59%. Dalam data ini terdapat 30% pemilih pemula yang merasa tidak tahu bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara itu ada saksi.

Data yang dipaparkan di atas dapat memberi gambaran bagaimana tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah kota Semarang tahun 2015. Bila dilihat sebaran data yang tertera menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pemula pengguna media sosial cukup baik, karena jumlah pemilih pemula yang berpartisipasi pada event utama yaitu pemungutan suara cukup tinggi. Mereka sebagian hadir di TPS meskipun ada sebagian yang mengambil keputusan untuk tidak memilih salah satu pasangan calon. Sedangkan partisipasi dalam penyelenggaraan yaitu kampanye dan keterlibatan dalam penyelenggaraan pemungutan suara masih kurang dari 50%.

Pengenalan dan penggunaan media sosial di atas para pemilih pemula di Kota Semarang sangat besar. Mereka aktif menggunakan beberapa perangkat media sosial yang populer di Indonesia sebagai sarana untuk memperoleh berbagai berita dan informasi seputar pilkada. Walaupun, dari data yang ada menunjukkan bahwa, informasi yang didapat bukan karena peran aktif pemilih pemula dalam mencari berita dan informasi tersebut melalui media sosial. Namun informasi-informasi pemilihan kepala daerah ini dikirim ke media sosial oleh tim kampanye, maupun lembaga terkait

untuk sosialisasi, dan me-nerpa pemilih pemula.

Penelitian tentang partisipasi pemilih pemula pengguna media sosial dalam pemilihan umum kepala daerah kota Semarang 2015 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, media sosial merupakan aplikasi teknologi informasi yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari pemilih pemula di kota Semarang sebagai media komunikasi dan informasi. Termasuk dalam hal berkomunikasi dan menerima informasi seputar pemilihan umum kepala daerah,

*Kedua*, pemilih pemula pengguna media sosial menaruh perhatian yang besar dalam perkembangan informasi seputar pemilukada sehingga mereka mengenal siapa calon pasangan yang maju dalam pemilihan serta selalu mengikuti perkembangan tahapan-tahapan dalam pemilihan umum kepala daerah Semarang. *Ketiga*, berita dan informasi pemilihan umum kepala daerah yang mereka ketahui dan diskusikan melalui media sosial secara tidak langsung ikut membentuk perilaku partisipasi mereka dalam menyikapi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Semarang.

*Keempat*, Partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kota Semarang tahun 2015 dari pemilih pemula pengguna sosial cukup tinggi ditandai sebagian besar dari mereka hadir pada saat hari pemungutan suara (Gono, 2016).

## Simpulan

Dalam sistem komunikasi politik demokratik saat ini dan masa depan, peran komunikasi massa, terutama TV, dan komunikasi menggunakan media baru berbasis teknologi komunikasi digital (Internet) sangat penting untuk penerangan kekuatan dan distribusi nilai. Di masyarakat Indonesia sudah mulai menunjukkan peningkatan ePartisipasi, tetapi peningkatan sangat pesat secara nasional, terutama melalui media sosial, terjadi saat muncul kasus-kasus khusus, seperti Kampanye Pemilu Presiden 2014, Pemilukada, KPK-Polri, kecelakaan pesawat Air-Asia, koin pengembalian bantuan Tsunami Aceh untuk Australia berkenaan hukuman mati warga Australia karena kasus Narkoba. Secara ideal demokrasi berarti memberdayakan secara merata bagi semua orang. Akan tetapi tidak semua orang mengambil peran untuk terlibat mempengaruhi pengambilan keputusan, tidak semua orang terlibat secara berkualitas dalam demokrasi hal ini karena keterbatasan yang dimilikinya untuk bisa berpartisipasi atau berbagai sebab sehingga tidak semua orang dalam sistem ini memiliki kesempatan memperoleh informasi dan menyatakan keinginan secara efektif. Secara sosiologis terjadi kesenjangan teknologi digital dalam masyarakat, karena terdapat 4 bentuk hambatan untuk melakukan akses media baru yaitu: (1) Ku-

rangnya "akses mental" yang mengacu pada kurangnya pengalaman masyarakat terhadap penguasaan teknologi digital paling dasar, (2) Kurangnya "akses material" yaitu berkaitan dengan kepemilikan komputer dan koneksi jaringan, (3) Kurangnya "akses ke-trampilan" yaitu tidak memiliki ketrampilan menggunakan teknologi digital. (4) Kurangnya "akses penggunaan" artinya kekurangan memperoleh kesempatan menggunakan teknologi digital secara berarti (Hacker 2003).

Istilah pemberdayaan sosial berarti mendorong masyarakat secara luas agar kekurangan akses-akses di masyarakat bisa meningkat secara signifikan. Selain membuka layanan teknologi digital hingga mencapai seluruh daerah secara geografis, juga membangun sarana pendidikan berbasis teknologi digital. Tiap individu dalam sistem juga berhak memperoleh kesempatan menggunakan teknologi ini secara memadai dan murah, agar ePartisipasi politik semakin baik. Secara kultural pemberdayaan masyarakat untuk melek terhadap media baru ini, akan membuka pikiran secara luas, beretika, dan berkomunikasi interaktif secara lebih dewasa.

Fokus penelitian ke depan berkenaan dengan peran penting komunikasi berbasis digital ini berkaitan dengan 2 hal,

menurut Bennet dan Entman yaitu: pengaruh terhadap seluruh kualitas kehidupan publik dan memperoleh kejelasan keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan secara khusus dalam demokrasi partisipatif (Bennet dan Entman, 2001).

Persoalan partisipasi secara khusus, yang perlu memperoleh catatan yaitu bahwa terdapat pola respons yang kompleks, tidak stabilnya sikap pemilih dalam pemilu, juga kualitas pemilu yang kurang optimal, berkurangnya kualitas informasi tentang kebijakan terus menerus, bertumbuhnya fokus group yang terbentuk berbasis pada pesan dari kelompok-kelompok kepentingan maupun kandidat, dan munculnya berita dan iklan politik negatif, yang membentuk polarisasi dalam masyarakat dan membangkitkan sinisme. Oleh karenanya fokus penelitian komunikasi politik bisa lebih dipersempit dan saling mengisi berkenaan dengan: (1) fokus pada pola respons individual terhadap pesan persuasif tertentu; (2) menekankan pada karakteristik proses komunikasi, utamanya berkenaan dengan penyusunan dan distribusi pesan dan informasi politik dalam sistem politik.

## Daftar Pustaka

Bennet, Lance W. and M. Entman. (2001) *Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy*, Cambridge University Press, USA.

Fuchs, Christian. (2008) *Internet and society : Social Theory in the Internet age*, Routledge 270 Madison Ave, New York, NY 10016.

Gono, Joyo Nur Suryanto. (2016) *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pengguna Media Sosial Pada Pemilu Kota Semarang 2015*, Laporan Penelitian.

Holmes, David. (2005) *Communication Theory: Media, Technology, Society*, Sage Publication, USA.

Rulli Nasrullah. (2014) *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Indonesia.

Sen, Khrisna dan David T. Hill. (2001) *Media, Budaya dan Politik Indonesia (terjemahan)*, Institut Studi Arus Informasi bekerjasama dengan PT Media Lintas Inti Nusantara, Jakarta, Indonesia.